

Mariks Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab	
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	Peningkatan sistem Manajemen SDM aparatur									
1	Pelaksanaan Analisis Jabatan	dokumen Analisis Jabatan	1	penyusunan rencana penyusunan Analisis Jabatan	√					Bag. Organisasi
			2	pengumpulan data analisis jabatan	√					Bag. Organisasi
			3	pengolahan data analisis jabatan	√					Bag. Organisasi
			4	penetapan analisis jabatan	√					Bag. Organisasi
			5	Monitoring dan evaluasi Analisis jabatan	√					Bag. Organisasi
2	Penyusunan analisis beban kerja	dokumen analisis beban kerja	1	penyusunan rencana penyusunan analisis beban kerja	√					Bag. Organisasi
			2	pengumpulan data analisis beban kerja	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
			3	pengolahan data beban kerja	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
			4	penetapan beban kerja	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
			5	Monitoring dan evaluasi Beban kerja	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
3	penyusunan Evaluasi Jabatan	Dokumen Evaluasi Jabatan	1	Penyusunan Rencana penyusunan evaluasi jabatan		√				Bag. Organisasi
			2	Pengumpulan data evaluasi jabatan		√				Bag. Organisasi
			3	pengolahan data evaluasi jabatan		√				Bag. Organisasi
			4	penetapan evaluasi jabatan		√				Bag. Organisasi
			5	Monitoring dan Evaluasi Evaluasi jabatan		√				Bag. Organisasi
4	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	dokumen standar kompetensi jabatan	1	penyusunan rencana penyusunan Standar Komeptensi Jabatan		√				Bag. Organisasi
			2	Pengumpulan data penyusunan standar kompetensi jabatan		√	√	√	√	Bag. Organisasi
			3	tindak lanjut hasil survey indeks kepuasan masyarakat		√	√	√	√	Bag. Organisasi
			4	Monitoring dan evaluasi standar kompetensi jabatan		√	√	√	√	Bag. Organisasi
5	penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat	analisis kebutuhan diklat	1	penyusunan rencana Penyusunan Analisis Kebutuhan Diklat			√			BKD
			2	pengumpulan data penyusunan analisis Kebutuhan Diklat			√			

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			3 Pengolahan data penyusunan analisis kebutuhan diklat			√	√	√	BKD
			4 penetapan analisis kebutuhan diklat			√	√	√	BKD
			5 monitoring dan evaluasi analisis kebutuhan diklat			√	√	√	BKD
	6 Assessment individu berdasarkan kinerja	dokumen <i>assessment</i> individu berdasarkan kinerja	1 penyusunan rencana kerja <i>Assessment</i> individu berdasarkan kinerja		√				Bag. Organisasi
			2 penyiapan tenaga assesor		√				Bag. Organisasi
			3 penyusunan <i>assessment</i> individu berdasarkan kinerja		√	√	√	√	Bag. Organisasi
			4 monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>Assessment</i> inividu berdasarkan kinerja		√	√	√	√	Bag. Organisasi
	7 pengisian jabatan secara terbuka	terlaksananya pengisian jabatan secara terbuka	1 penyusunan rencana Kerja pengisian jabatan secara terbuka		√				BKD
			2 pengembangan pola pengaduan masyarakat		√	√	√	√	BKD
			3 tindak lanjut pola pengaduan masyarakat		√	√	√	√	BKD
			4 monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat		√	√	√	√	BKD
	8 pemberian tunjangan kinerja	pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja	1 penyusunan rencana kerja pemberian tunjangan kinerja	√					Bag. Organisasi
			2 penyusunan peraturan Bupati tentang tunjangan kinerja	√		√			Bag. Organisasi
			3 penetapan tunjangan kinerja	√		√			Bag. Organisasi
			4 monitoring dan evaluasi tunjangan kinerja	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
2	Peningkatan Pengawasan								
	1 Penerapan SPIP	Peraturan Bupati tentang SPIP Laporan Evaluasi dan Monitoring Penerapan SPIP di SKPD.	1 Sosialisasi SPIP ke SKPD	√					Inspektorat
			2 Menyusun Rencana Penerapan SPIP	√					Inspektorat
			3 Penerapan SPIP	√					Inspektorat
			4 Monitoring dan Evaluasi SPIP	√					Inspektorat

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab		
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
	2	Peningkatan Peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	Tersedianya APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> Tersedianya APIP yang bersertifikat Meningkatnya pengetahuan APIP	1	Menyusun rencana Peningkatan Peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	√					Inspektorat
				2	Menambah tenaga APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>	√					Inspektorat
				3	Pelatihan bagi APIP untuk meningkatkan Quality	√	√	√	√	√	Inspektorat
				4	Penerapan Peran APIP sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>	√	√	√	√	√	Inspektorat
	3	Penyampaian LHKPN tepat waktu	Peraturan Bupati tentang LHKPN SOP LHKPN Dokumen LHKPN Laporan Monitoring LHKPN Penyerahan LHKPN	1	Pembuatan Peraturan Bupati tentang LHKPN	√					Inspektorat
				2	Konsultasi ke KPK tentang LHKPN	√					Inspektorat
				3	Pembuatan SOP LHKPN	√					Inspektorat
				4	Sosialisasi LHKPN	√					Inspektorat
				5	Asistensi LHKPN	√					Inspektorat
				6	Monitoring Evaluasi LHKPN	√					Inspektorat
				7	Penyampaian berkas LHKPN	√					Inspektorat
	4	Penerapan <i>Whistler Blower</i>	Peraturan Bupati tentang <i>whistle blower</i> SOP <i>whistel blower</i> system	1	Pembuatan SK Bupati tentang <i>whistle blower</i>	√					Inspektorat
				2	Pembuatan SOP <i>whistel blower</i>	√					Inspektorat
			Monitoring dan evaluasi <i>whistel blower</i> system	3	Pembuatan Sistem <i>Whistel blower</i>	√					Inspektorat
				4	Pembuatan Kotak pengaduan dan <i>Contact Person</i> Pengaduan	√	√	√	√	√	Inspektorat
				5	Penerapan <i>whistel blower</i>	√	√	√	√	√	Inspektorat
				6	Monitoring dan evaluasi <i>Whistler blower</i> system	√	√	√	√	√	Inspektorat
5	Pelaksanaan saran perbaikan diberikan oleh BPK/KPK/APIP	Laporan pelaksanaan Monitoring perbaikan sesuai saran BPK/KPK/APIP  Laporan kerugian negara/ daerah	1	Menyusun <i>Road Map</i> Monitoring Perbaikan sesuai saran yang diberikan BPK/KPK/APIP	√					Inspektorat	
			2	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut saran perbaikan diberikan oleh BPK/KPK/APIP	√	√	√	√	√	Inspektorat	

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab		
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
	6	pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi	Laporan pelaksanaan anti korupsi	1	Menyusun roadmap anti Korupsi	√					Inspektorat
				2	Sosialisasi anti korupsi	√	√	√	√	√	Inspektorat
				3	Melaksanakan kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi	√	√	√	√	√	Inspektorat
	7	Pengendalian Gratifikasi	Laporan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi	1	Menyusun rencana pengendalian gratifikasi						Inspektorat
				3	Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi	√					Inspektorat
				4	Konsultasi masalah gratifikasi ke KPK	√	√	√	√	√	Inspektorat
				5	Menyediakan sarana dan prasarana pengendalian gratifikasi	√	√	√	√	√	Inspektorat
				6	Monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi	√	√	√	√	√	Inspektorat
3	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja										
	1	Penerapan SAP berbasis akrual	Tersedia laporan keuangan SKPD dan Pemda berbasis akrual	1	Sosialisasi	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Pembinaan	√	√	√	√	√	DPPKAD
				3	Evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD dan SKPKD	√	√	√	√	√	DPPKAD
				4	Penyusunan Laporan keuangan Konsolidasian dan Perda/Perbup Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	√	√	√	√	√	DPPKAD
	2	Penerapan SIA berbasis IT	Tersedia Output Sistem Informasi Akuntansi Keuangan berbasis IT berupa database akuntansi dan keuangan	1	Sosialisasi	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Pembinaan	√	√	√	√	√	DPPKAD
				3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembukuan dan laporan keuangan	√	√	√	√	√	DPPKAD
				4	Melakukan perbaikan yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	DPPKAD
	3	Rekonsiliasi Data Realisasi pendapatan dan belanja	Tersedia data hasil rekon berupa laporan triwulan dan semesteran	1	Rekonsiliasi data	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Evaluasi	√	√	√	√	√	DPPKAD
				3	Penyusunan Laporan Triwulan dan Semesteran	√	√	√	√	√	DPPKAD
	4	Penyusunan / Review harga satuan barang dan jasa	Tersusunnya satuan harga barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-	1	Pengumpulan data dari SKPD teknis	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Kompilasi daftar harga satuan barang dan jasa	√	√	√	√	√	DPPKAD

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab		
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan BMD yang sesuai antara laporan dan fisik barang baik dari segi kualitas maupun	1	Inventarisasi dan cek eksistensi BMD beserta dokumen kepemilikannya	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Rekonsiliasi laporan barang dan lap. keuangan	√	√	√	√	√	DPPKAD
				3	Penertiban dan pengamanan BMD	√		√		√	DPPKAD
				4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan BMD	√					DPPKAD
				5	Melakukan perbaikan yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan	√	√	√	√	√	DPPKAD
	6	Penilaian BMD untuk mendukung proses pemanfaatan dan pembukuan BMD	tersusunnya nilai BMD	1	Pendataan BMD yang akan dinilai dalam setiap tahun anggaran	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Penilaian BMD dalam rangka penyusunan daftar BMD sebagai input dalam proses penyusunan laporan keuangan	√	√	√	√	√	DPPKAD
				3	Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan	√	√	√	√	√	DPPKAD
				4	Penilaian BMD dalam rangka pemindahtanganan	√	√	√	√	√	DPPKAD
				5	Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga yang berkompeten dlm penilaian BMD	√	√	√	√	√	DPPKAD
	7	Penghapusan BMD	terlaksananya penghapusan BMD	1	Inventarisasi BMD yang akan dihapus	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Penghapusan BMD yang telah memenuhi syarat	√	√	√	√	√	DPPKAD
	8	Penilaian dan Penaksiran BMD	terlaksananya penilaiandan penaksiran BMD	1	Pendataan BMD yang akan dinilai dan ditaksir	√	√	√	√	√	DPPKAD
				2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian dan penaksiran BMD	√	√	√	√	√	DPPKAD
	9	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat koordinasi dan pendampingan penyusunan Laporan BMD	Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pejabat pengelola BMD	1	Sosialisasi tentang pedoman pengelolaan BMD	√		√		√	DPPKAD
2				Bimbingan teknis penyusunan Lap. BMD di seluruh SKPD, Kepala UPT dan Kepala Puskesmas	√		√			DPPKAD	
3				Sosialisasi tentang aset PEMKAB dan aset desa		√		√		DPPKAD	

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab		
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
			4	Rapat koordinasi pengelolaan BMN/BMD yang ada di Kab. Kapuas Hulu	√	√	√	√	√	DPPKAD	
	10	perumusan dan penyempurnaan peratutan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah		tersusunnya dan tersedianya peraturan perundang-undangan yang kokoh dan menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan barang milik daerah							
			1	Penyusunan dan perumusan peraturan perundang-undangan	√		√		√	DPPKAD	
			2	Meningkatkan koordinasi penyempurnaan dan perumusan peraturan perundang-undangan	√		√		√	DPPKAD	
			3	Melakukan pengkajian hukum atas berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah	√		√		√	DPPKAD	
4. Penguatan Ketatalaksanaan											
	1	Pengembangan SOP	dokumen SOP	1	penyusunan rencana kerja pelaksanaan SOP	√					Bag Organisasi
				2	identifikasi penyusunan SOP	√					seluruh SKPD
				3	penyusunan SOP	√	√	√	√	√	SKPD
				4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
	2	penyusunan <i>masterplan</i> Teknologi Informasi dan	dokumen teknologi informasi dan komunikasi	1	penyusunan rencana kegiatan penyusunan <i>masterplan</i> TIK		√				Dinas Hubkominfo
				2	penyusunan <i>masterplan</i> TIK		√				Dinas Hubkominfo
	3	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	tersedianya sarana dan prasarana TIK	1	penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana TIK		√				Dinas Hubkominfo
				2	pembangunan sarana dan prasarana TIK		√	√			Dinas Hubkominfo
	4	pengembangan <i>Website</i>		1	Penyusunan rencana pengembangan <i>website</i>	√					Dinas Hubkominfo
				2	pengembangan <i>Website</i> Kabupaten Kapuas Hulu	√	√	√	√	√	Dinas Hubkominfo
	5	Pembangunan dan Pengembangan <i>E-Planning</i>	penerapan <i>E-Planning</i>	1	Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan <i>E-Planning</i>		√				Bappeda

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			2 Pembangunan dan Pengembangan <i>E-Planning</i>		√	√	√	√	Bappeda
			3 sosialisasi dan workshop penerapan <i>E-Planning</i>		√	√	√	√	Bappeda
			4 Monitoring dan evaluasi <i>E-Planning</i>		√	√	√	√	Bappeda
	6 Pembangunan dan Pengembangan <i>E-Budgeting</i>	Penerapan <i>E-Budgeting</i>	1 Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan <i>E-Budgeting</i>		√				DPKAD
			2 Pembangunan dan Pengembangan <i>E-Budgeting</i>		√	√	√	√	DPKAD
			3 sosialisasi dan workshop penerapan <i>E-Procurement</i>		√	√	√	√	DPKAD
			4 Monitoring dan evaluasi <i>E-Budgeting</i>		√	√	√	√	DPKAD
	7 Pengembangan <i>E-Procurement</i>	Penerapan <i>E-Procurement</i>	1 Penyusunan rencana pengembangan <i>E-Procurement</i>	√					ULP
			2 Pengembangan <i>E-Procurement</i>	√	√	√	√	√	ULP
			3 sosialisasi dan workshop penerapan <i>E-Procurement</i>	√	√	√	√	√	ULP
			4 Monitoring dan evaluasi <i>E-Procurement</i>	√	√	√	√	√	ULP
	8 Pembangunan dan Pengembangan <i>E-Performance</i>	Penerapan <i>E-Performance</i>	1 Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan <i>E-Performance</i>		√				Bag Organisasi
			2 Pembangunan dan Pengembangan <i>E-Performance</i>		√	√	√	√	Bag Organisasi
			3 sosialisasi dan workshop penerapan <i>E-Performance</i>		√	√	√	√	Bag Organisasi
			4 Monitoring dan evaluasi <i>E-Performance</i>		√	√	√	√	Bag Organisasi
	9 pengembangan SIAK	Pengembangan SIAK	1 Penyusunan rencana pengembangan SIAK	√	√				Dinas Dukcapil
			2 Pengembangan SIAK	√	√	√	√	√	Dinas Dukcapil
			3 Monitoring dan evaluasi SIAK	√	√	√	√	√	Dinas Dukcapil
	10 Pengembangan SIMPEG	pengembangan SIMPEG	1 Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan SIMPEG	√					BKD
			2 Pengembangan SIMPEG	√	√	√	√	√	BKD
			3 Monitoring dan evaluasi SIMPEG	√	√	√	√	√	BKD
	11 Pembangunan dan pengembangan E-Arsip	Penerapan E-Arsip	1 Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan E-Arsip		√				dinas Kominfo
			2 Pembangunan dan Pengembangan E-Arsip		√				dinas Kominfo

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			3 sosialisasi dan workshop penerapan E-Arsip		√				dinas Kominfo
			4 Monitoring dan evaluasi E-Arsip		√				dinas Kominfo
12	Pembangunan dan Pengembangan Administrasi Keuangan Elektronik	Penerapan Administrasi Keuangan Elektronik	1 Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan Administrasi Keuangan Elektronik	√					DPKAD
			2 Pembangunan dan Pengembangan Administrasi Keuangan Elektronik	√	√	√	√	√	DPKAD
			3 sosialisasi dan workshop penerapan Administrasi Keuangan Elektronik	√	√	√	√	√	DPKAD
			4 Monitoring dan evaluasi Administrasi Keuangan Elektronik	√	√	√	√	√	DPKAD
13	pelaksanaan Tata naskah dinas elektronik	Penerapan TNDE	1 Penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan TNDE		√				Bag Organisasi
			2 penyusunan petunjuk pelaksanaan TNDE		√				Bag Organisasi
			3 sosialisasi pelaksanaan TNDE		√				Bag Organisasi
			4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan TNDE		√				Bag Organisasi
14	Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja	terpenuhinya sarana dan prasarana kerja	1 penyusunan rencana standarisasi sarana dan prasarana kerja		√				Bag Umum
			2 identifikasi sarana dan prasarana kerja		√				Bag Umum
			3 identifikasi pemenuhan sarana dan prasarana kerja		√				Bag Umum
			4 pemenuhan sarana dan prasarana kerja		√	√	√	√	SKPD
			5 monitoring standarisasi sarana dan prasarana kerja		√	√	√	√	bag umum
15	penyusunan pola <i>public hearing</i>	proses pengambilan kebijakan publik melibatkan	1 penyusunan rencana pengembangan <i>public hearing</i>		√				Bag Organisasi
			2 Sosialisai permenpan RB tentang penyusunan kebijakan publik		√				Bag Organisasi
			3 penyusunan pedoman pelaksanaan <i>public hearing</i>		√				Bag Organisasi
			4 pelaksanaan <i>public hearing</i>			√	√	√	SKPD

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			5 monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>public hearing</i>			√	√	√	SKPD
	16 Efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan	optimalisasi penggunaan fasilitas kedinasan	1 Menyusun rencana tindak efisiensi Penggunaan Fasilitas Kedinasan		√				Bag. Pengendalian Pembangunan
			2 Penerapan efisiensi penggunaan fasilitas kedinasan		√	√	√	√	Seluruh SKPD
	17 Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada	optimalisasi fasilitas Pemerintah	1 Menyusun rencana pendayagunaan fasilitas Pemerintah Daerah		√				Bagian Umum
			2 Pendayagunaan fasilitas Pemerintah Daerah		√	√	√		seluruh SKPD
			3 Monitoring dan pendayagunaan fasilitas Pemerintah Daerah		√	√	√		Seluruh SKPD
5	<i>Quick Wins</i>								
	1 Pelayanan Perizinan Keliling	terlaksananya pelayanan perizinan keliling	1 Menyusun rencana pelayanan perizinan keliling;	√	√	√	√	√	KPMPPT
			2 Mengidentifikasi jenis pelayanan yang akan diberikan dalam pelayanan perizinan terpadu;	√	√	√	√	√	KPMPPT
			3 Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan perizinan keliling;	√	√	√	√	√	KPMPPT
			4 Monitoring	√	√	√	√	√	KPMPPT
			5 Evaluasi	√	√	√	√	√	KPMPPT
	2 Penetapan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro	ditetapkannya PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro	1 Menyusun rencana kerja penetapan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro;	√	√	√	√	√	DPPKAD
			2 Menyusun rencana dan kerangka PPK BLUD untuk RSUD dr. Achmad Diponegoro;	√	√	√	√	√	DPPKAD
			3 Melengkapi persyaratan pengusulan PPK BLUD;	√	√	√	√	√	DPPKAD
			4 Telaahan persyaratan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro;	√	√	√	√	√	DPPKAD
			5 Pengusulan PPK BLUD RSUD dr. Achmad Diponegoro;	√	√	√	√	√	DPPKAD
			6 Penetapan PPK BLUD	√	√	√	√	√	DPPKAD
			7 Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;	√	√	√	√	√	DPPKAD

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab		
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
	3	Pelatihan PONEK	8	Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;	√	√	√	√	√	DPPKAD	
			1	Menyusun rencana pelatihan PONEK	√	√	√	√	√	RSUD dr.Achmad Diponegoro	
			2	Melaksanakan pelatihan PONEK	√	√	√	√	√	RSUD dr.Achmad Diponegoro	
			3	monitoring;	√	√	√	√	√	RSUD dr.Achmad Diponegoro	
				4	evaluasi	√	√	√	√	√	RSUD dr.Achmad Diponegoro
	4	Pelaksanaan Akreditasi untuk 6 pelayanan kesehatan tingkat pertama		1	Menyusun rencana kerja pelaksanaan akreditasi untuk 6 pelayanan kesehatan tingkat pertama	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
				2	Menyusun rencana dan kerangka pelaksanaan akreditasi untuk 6 pelayanan kesehatan tingkat pertama	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
				3	Melengkapi persyaratan akreditasi pelayanan kesehatan tingkat pertama	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
				4	Pengusulan akreditasi pelayanan kesehatan tingkat pertama	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
				5	Monitoring;	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan
			6	Evaluasi	√	√	√	√	√	Dinas Kesehatan	
6	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM										
	1	Penyiapan Dinas Kesehatan, Kantor Penanaman Modal dan pelayanna Perizinan Terpadu sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	Penyiapan Dinas Kesehatan, Kantor Penanaman Modal dan pelayanna Perizinan Terpadu sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;						Inspektorat
	2	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM						Inspektorat

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab			
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5				
	3	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Kesehatan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	1	Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Dinas Kesehatan, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu						Inspektorat	
	4	Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	1	Monitoring						Inspektorat	
	5	Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	1	Evaluasi						Inspektorat	
	6	Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	1	Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi						Inspektorat	
				2	Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya							Inspektorat
	7	Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	1	Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya						Inspektorat	
				2	Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM							Inspektorat
<b>7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>												
	1	Deregulasi proses perizinan	seluruh proses perizinan dilakukan oleh unit pelayanan perizinan satu pintu	1	penyusunan rencana deregulasi perizinan	√					KPMPPT	
				2	pelaksanaan deregulasi perizinan	√						KPMPPT
				3	monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses perizinan	√						KPMPPT
	2	evaluasi Standar pelayanan Minimal	dokumen analisis peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1	penyusunan rencana evaluasi standar pelayanan minimal	√					Bag. Organisasi	
				2	evaluasi penerapan standar pelayanan minimal	√	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
			3 tindak lanjut evaluasi standar pelayanan minimal	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab		
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
	3	penyusunan Informasi Pelayanan Publik	pelaksanaan Maklumat Pelayanan	1	Penyusunan Rencana informasi Pelayanan Publik	√					Bag. Organisasi
				2	Penyusunan Maklumat Pelayanan	√					Bag. Organisasi
				3	sosialisasi Informasi Pelayanan Publik	√					Bag. Organisasi
				4	Monitoring dan Evaluasi Informasi Pelayanan Publik	√					Bag. Organisasi
	4	survey indeks kepuasan masyarakat	dokumen survey indeks kepuasan masyarakat	1	penyusunan rencana pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat	√					Bag. Organisasi
				2	pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
				3	tindak lanjut hasil survey indeks kepuasan masyarakat	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
	5	sertifikasi standar mutu ISO	sertifikasi Iso pada unit pelayanan publik	1	penyusunan rencana penerapan sertifikat ISO	√					Bag. Organisasi
				2	identifikasi jenis pelayanan yang akan mendapat sertifikasi ISO	√					Bag. Organisasi
				3	persiapan pengusulan sertifikasi ISO	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
				4	pengajuan sertifikasi ISO	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi
	6	pemingkatan pelayanan publik	peringkat unit pelayanan publik	1	penyusunan rencana pemingkatan unit pelayanan publik	√					Bag. Organisasi
				2	pelaksanaan pemingkatan unit pelayanan publik		√	√	√	√	Bag. Organisasi
				3	evaluasi pelaksanaan pemingkatan unit pelayanan publik		√	√	√	√	Bag. Organisasi
	7	pengembangan pola pengaduan masyarakat	terwujudnya sistim pengaduan masyarakat	1	penyusunan rencana pola pengaduan masyarakat	√					seluruh SKPD
				2	pengembangan pola pengaduan masyarakat		√	√	√	√	seluruh SKPD
				3	tindak lanjut pola pengaduan masyarakat		√	√	√	√	seluruh SKPD
				4	monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat		√	√	√	√	seluruh SKPD
	8	penetapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu	Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu	1	Penyusunan Rencana Kerja Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu	√					Bag. Organisasi
				2	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu	√					Bag. Organisasi
3				Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kapuas Hulu	√	√	√	√	√	Bag. Organisasi	

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
<b>8. Penataan Perundang-Undangan</b>									
	1 Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan	dokumen analisis identifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan	1 Penyusunan Rencana Kerja identifikasi peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan	√					Bag. Hukum
			2 pelaksanaan Identifikasi Peraturan perundang-undangan	√					Bag. Hukum
			3 monitoring dan evaluasi Identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan	√					Bag. Hukum
	2 Penataan Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan	peraturan perundang-undangan yang telah	1 penyusunan rencana kerja Penataan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan	√					Bag. Hukum
			2 penataan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan	√	√	√	√	√	Bag. Hukum
		3 monitoring dan evaluasi penataan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan	√	√	√	√	√	Bag. Hukum	
<b>9. Penataan kelembagaan</b>									
	1 evaluasi organisasi perangkat daerah	dokumen evaluasi OPD	1 penyusunan rencana pelaksanaan evaluasi OPD			√			Bag. Organisasi
			2 pelaksanaan evaluasi OPD			√			Bag. Organisasi
			3 tindak lanjut pelaksanaan OPD			√			Bag. Organisasi
	2 peningkatan kapasitas kelembagaan urusan penanaman modal	dokumen analisis peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	1 penyusunan rencana peningkatan kapasitas urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu		√				Bag. Organisasi
			2 analisis peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu		√				Bag. Organisasi
	3 peningkatan kapasitas kelembagaan urusan Kepegawaian dan Kediklatan	dokumen analisis peningkatan kapasitas kelembagaan kepegawaian dan kediklatan	1 penyusunan rencana peningkatan kapasitas bidang Kepegawaian dan Kediklatan		√				Bag. Organisasi
2 analisis peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Kepegawaian dan Kediklatan				√				Bag. Organisasi	

Nomor	Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator dan target	Tahapan/aktivitas	Perkiraan Waktu penyelesaian					Penanggungjawab		
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5			
	4	peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pelayanan publik	dokumen analisis peningkatan kapasitas kelembagaan pelayanan publik	1	penyusunan rencana peningkatan kapasitas bidang pelayanan publik		√				Bag. Organisasi
				2	analisis peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pelayanan publik		√				Bag. Organisasi
	5	peningkatan kapasitas kelembagaan Kecamatan	dokumen evaluasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat	1	Penyusunan rencana peningkatan kapasitas urusan kecamatan		√				Bag. Organisasi
				2	evaluasi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat		√				Bag. Organisasi
				3	analisis peningkatan kelembagaan kecamatan		√				Bag. Organisasi
	6	penataan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah	Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	1	penyusunan rencana penataan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu		√				Bag. Pemerintahan
				2	analisis penataan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu		√				Bag. Pemerintahan
				3	penyusunan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah		√				Bag. Pemerintahan

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR